

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA

Rizki Nurhidayah¹

Nurhidayahrizki8513@gmail.com

¹ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Wirawan Suhaedi²

wirawan.suhaedi@unram.ac.id

² Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Adhitya Bayu Suryantara³

adhityabayu@unram.ac.id

³ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja aparat desa, dan kualitas pelatihan terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif. Data primer akan dijadikan sumber data melalui metode pengumpulan data kuesioner. Populasi penelitian ini adalah pemahaman pengelola keuangan desa di Kecamatan Palibelo. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kriteria pengambilan sampelnya adalah perangkat desa yang berperan langsung dalam memahami pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, badan permusyawaratan desa dan kasi pemerintahan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja aparatur desa, dan kualitas pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa dan pemerintah bupati dengan meningkatkan tingkat pendidikan, pengalaman aparatur desa, dan kualitas pelatihan pemahaman pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Tingkat pendidikan, pengalaman kerja aparatur desa, kualitas pelatihan pemahaman pengelolaan keuangan desa

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Education Level, work experience of village officials, and the quality of training on the understanding of Village Financial Management in Palibelo District, Bima Regency. The research method used is associative research method. Primary Data will be used as a source of data through questionnaire data collection methods. The population of this study is the understanding of village financial managers in the District Palibelo. Sampling technique using purposive sampling. The criteria for sampling are village officials who play a direct role in understanding village financial management, such as village heads, secretaries, treasurers, village consultative bodies and head of government. Data analysis method using multiple regression analysis using SmartPLS. The results of this study indicate that the level of education, work experience of village administrators, and the quality of training partially affect the understanding of Village Financial Management. This study contributes to improving the quality of understanding of village financial management by the village government and the Regent government by increasing the level of education, experience of village officials, and the quality of training on understanding Village Financial Management.

Keywords: Level of education, work experience of village officials, the quality of training understanding of Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi desa melalui Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004) memberikan otonomi yang luas kepada desa, dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di desa, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di desa, peningkatan efisiensi pelayanan publik di desa, peningkatan percepatan pembangunan desa dan pada akhirnya diharapkan pula dapat menciptakan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*) (Fitria, 2019). Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing agar memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan. Pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). Dengan demikian sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Agus Ashari et al., 2021). Hak desa semakin bertambah dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam posisi desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan. Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga memperoleh kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah Republik Indonesia Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yaitu desa sangatlah menarik untuk dikaji dan dipahami, dimana desa Pada tahun 2019 untuk Kabupaten Bima, 191 desa yang tersebar di 18 Kecamatan mendapatkan dana desa. Dan diantaranya 118 desa mengalami penundaan pencairan dana desa (DDA), salah satunya adalah di Wilayah Kecamatan Palibelo. Dana desa yang merupakan salah satu jenis bantuan keuangan selalu menjadi topik menarik untuk dibahas. Dalam hal ini munculnya persoalan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pemerintah desa masih kurang menguasai pengelolaannya, dan dapat disimpulkan bahwa besarnya dana desa yang harus dikelola oleh pemerintah desa belum selaras dengan kemampuan SDM sehingga dianggap menjadipenghambat di lapangan, selain karena keberadaan regulasi yang relatif baru dan belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di daerah yaitu pemerintah desa. Artinya dapat diduga bahwa sebagian besar desa yang ada di Indonesia melakukan pemilihan kepala desa secara aklamasi kekeluargaan, tanpa memperhatikan kemampuan atau kompetensi yang akan sangat mempengaruhi kinerjanya, hal ini juga ditemukan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa, dimana ketergantungan satu atau dua orang perangkat desa menyebabkan rencana pembangunan desa menjadi tidak merata. Selain

itu seringkali ditemukan pengelolaan keuangan desa hanya diputar untuk keuntungan orang-orang tertentu, pelaporannya tidak tepat waktu, minimnya keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh desa, kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam, sedikitnya nilai tambah sumber daya ekonomi serta infrastruktur yang kurang memadai semakin memperlambat tercapainya cita-cita yang diharapkan dari adanya otonomi desa.

Permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan suatu desa akan terlambat karena kurangnya pengetahuan aparatur desa saat proses pengelolaan keuangan diantaranya pemahaman akuntansi sektor publik disebabkan rendahnya pendidikan dan kesalahan penempatan staf yang tidak sesuai (Eriva, 2013). Terdapat korelasi antara jenjang pendidikan seseorang dengan kemampuan dan keahlian dalam mengelola keuangan desa. Terbatasnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai aparatur desa sehingga mengakibatkan pengelolaan dan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang dibuat. Hal ini didukung oleh penelitian dari (Fatmaliza et al., 2018) yang mengungkapkan perangkat desa yang tingkat pendidikan tidak sesuai akan menyebabkan pengalaman dan ilmu yang diperoleh tidak mampu mendukung pekerjaannya. Hasil ini didukung oleh penelitian dari (Farlina & Hartono, 2019), (Wibisono et al., 2022) dan (Hasibuan, 2010) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi hal ini tidak didukung oleh penelitian (Nusron & Andriani, 2021) yang menemukan hal sebaliknya.

Selain tingkat pendidikan, pengalaman kerja juga diduga mempengaruhi pemahaman pengelolaan keuangan desa. Menurut (Hasibuan, 2010), pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Dalam pekerjaan perlu adanya sebuah pengalaman yang menjadi persyaratan dengan tujuan bahwa karyawan tersebut tidak akan canggung untuk dapat menempatkan diri secara tepat dalam berbagai kondisi, berani mengambil resiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan baik terhadap berbagai pihak. Pernyataan pengalaman kerja berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa didukung oleh (Nusron & Andriani, 2021), (Hasibuan, 2010), serta (Sukriani et al., 2018). Sementara hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Budiarti dan Girsang yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap pemahaman aparatur desa.

Faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa adalah kualitas pelatihan. Pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan merupakan orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya (Kandou, 2013). Hasil penelitian dari (Murina, 2017) menyatakan bahwa lemahnya pemahaman aparatur desa disebabkan kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh penelitian (Hasibuan, 2010) dan (Sukriani et al., 2018). Akan tetapi hasil tersebut berbeda dengan penelitian dari (Nusron & Andriani, 2021) yang menyatakan kualitas pelatihan tidak berpengaruh terhadap aparatur desa.

TINJAUAN LITERATUR

Human Capital (Modal Manusia)

Menurut Van Horn (1999), *Intellectual Capital atau Human Capital* adalah berbagai macam sumber daya yang dimiliki perusahaan yang berupa keterampilan, pengetahuan, kompetensi dan sumber daya lain yang bersifat aset tidak berwujud yang dapat digunakan entitas dalam mencapai tujuannya. *Human Capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya.

Keterkaitan antara teori *Human Capital* dengan penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kasi pemerintahan yang berperan sebagai *human capital* dalam pemerintah desa sehingga semua pihak yang bertugas dalam pengelolaan keuangan desa harus memiliki keahlian maupun pengetahuan yang cukup untuk dapat mencapai tujuan awal pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan

Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes, atau rencana kerja pemerintah yang disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana.

2. Pelaksanaan

Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan Kaur Keuangan.

3. Penatausahaan

Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4. Pelaporan

Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pelaporan ialah proses ke empat dalam pengelolaan keuangan dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBdes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

5. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pertanggungjawaban ialah proses terakhir yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat se tiap akhir periode anggaran.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk menghimpun dan meningkatkan pengetahuan. Pendidikan diperoleh melalui pembelajaran secara terstruktur dan dalam waktu yang relatif lama. Pendidikan menumbuhkan kemampuan untuk menimbang dan memilih informasi dan membentuk informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan (Pratiwi, 2014).

Pengalaman Kerja Aparatur Desa

Menurut (Manullang, 2014). pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan dan keterampilan tentang metode suatu pekerjaan bagi para pegawai karena

keterlibatan tersebut dalam pelaksanaan pekerjaannya. Pengalaman dan pendidikan sering digunakan secara bersamaan, karena kombinasi antara pengalaman dan pendidikan dapat menciptakan kemampuan tersendiri dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan.

Kualitas Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pelatihan adalah aktifitas-aktifitas yang berfungsi meningkatkan kinerja seseorang dalam pekerjaan yang sedang dialami atau yang terkait dengan pekerjaannya (Murina, 2017).

Desa

Undang – Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa beberapa pembukuan wajib diselenggarakan oleh bendahara desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa mewajibkan bendahara desa membuat buku kas umum dan beberapa buku pembantu lainnya.

Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Pada pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan dalam PP 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa.

Perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam mengolah laporan keuangan. Hal ini dikarenakan perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mengetahui akan pentingnya pemahaman pengelolaan keuangan bagi perangkat desa.

Menurut (Hasibuan, 2010) pendidikan di dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang. Tingkat pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman konsep pengetahuan dan keahlian yang disertai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan

(Murina, 2017). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Pratiwi, 2014), (Hasibuan, 2010), dan (Muzahid, 2014) mengungkapkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H¹ = Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa

Pengalaman kerja aparatur desa mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dimana bidang pengalaman ilmu lain selain bidang keuangan/akutansi juga memiliki relevansi dan keterkaitan untuk memudahkan menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut (Manullang, 2014), pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Sedangkan pendapat Trijoko dalam (Hasibuan, 2010) mengatakan pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama waktu tertentu). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Cahyadi, 2009), (Pratiwi, 2014), dan (Eriva, 2013) mengungkapkan pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H² = Pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kualitas Pelatihan Terhadap Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa

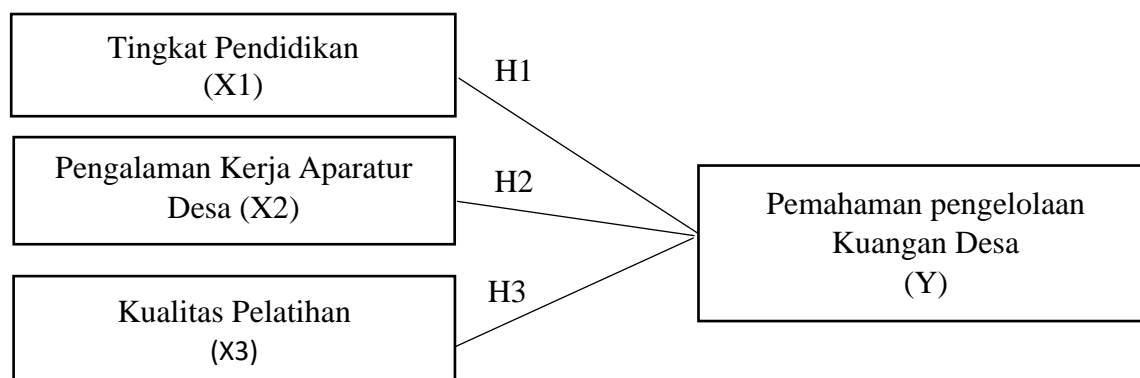
Kualitas pelatihan yang diberikan pihak terkait kepada perangkat desa tentang pemahaman pengelolaan keuangan desa seperti tahap penyaluran dana transfer ke Desa, hal-hal yang harus diantisipasi dalam penyampaian laporan keuangan, ketentuan pertanggungjawaban dana transfer desa, Integrasi data ke portal open data desa, dan rencana tindak lanjut desa sehingga menambah pemahaman mereka terkait pemahaman laporan keuangan desa menjadi lebih baik dan mendukung proses pembuatan laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Muzahid, 2014), dan (Hasibuan, 2010) mengungkapkan kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa.

Pelatihan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Informasi yang dihasilkan oleh aparatur desa bagian keuangan / akuntansi memerlukan pelatihan sehingga dapat membantu pekerjaan kepala desa (Eriva, 2013). (Eriva, 2013) mengungkapkan bahwa dengan adanya pelatihan dimana karyawan akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas.). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Muzahid, 2014), dan (Hasibuan, 2010) mengungkapkan kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H³ = Kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja Aparatur desa, dan Kualitas Pelatihan dalam pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa. Peneliti menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran atas masalah yang ada pada penelitian ini yaitu pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja aparatur desa, dan kualitas pelatihan terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah pada Desa Roi di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang terdiri dari 12 Desa. Pada penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberi jawabannya (Suliyanto, 2009).

Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai (perangkat desa) yang mengelola keuangan desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yaitu kepala desa dibantu oleh aparatur desa.

Sample

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Teknik *purposive sampling* termasuk ke dalam *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017). Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu Perangkat desa yang

berperan langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: 1) kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi pemerintahan dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. 2) Memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Berdasarkan pada teknik dan kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta hasilnya berbentuk angka (Sugiyono, 2017).

Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan siapa yang paling tau, siapa yang ditanyakan dan dapat memberikan informasi yang valid (Sugiyono, 2017, p. 434). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis secara terstruktur kepada responden penelitian berkaitan dengan tanggapannya terhadap berbagai variabel yang diteliti dalam penelitian ini (Sugiyono, 2017, p. 142).

Metode Analisis data

Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis alat analisis yang digunakan adalah teknik *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan aplikasi software SmartPLS versi 4

Uji Instrumen

Uji Instrumen Pada prinsipnya meneliti ialah melakukan pengukuran, sehingga harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrument penelitian. Sehingga arti dari instrument penelitian ialah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam (variabel penelitian) maupun sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 2017).

Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis yang dilakukan terhadap variabel yang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja apartur desa, dan kualitas pelatihan. Data yang akan digunakan adalah 12 desa dengan jumlah responden 60 orang yang bekerja dibagian pengelolaan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek dalam penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Kecamatan Palibelo mempunyai 12 desa antara lain Desa Roi, Desa Dore, Desa Nata, Desa Teke, Desa Ntonggu, Desa Ntonggorisa, Desa Ntonggondoa, Desa Bre, Desa Ragi, Desa Padolo, Desa Panda dan Desa Belo. Responden dalam penelitian adalah pengelola keuangan desa yang ada di Kecamatan Palibelo. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel yaitu: Perangkat Desa yang berperan langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua badan permusyawaratan desa, kasi pemerintahan serta memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2023 dengan membagi kuesioner kepada 12 Kantor Desa di Kecamatan Palibelo. Kuesioner disebarkan kepada 60 responden

dengan 5 responden di masing-masing desa. Jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 60 kuesioner.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja Aparatur Desa	Kualitas Pelatihan	Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa
MODUS	5	5	3	3
MEAN	3,82	4,33	3,67	3,73
MEDIAN	4	5	4	4
MIN	1	1	1	1
MAX	5	5	5	5
STDEV	1,026	1,052	1,047	1,034
N	60	60	60	60

Berdasarkan tabel 2. statistik deskriptif diatas didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut:

Pada variabel tingkat pendidikan (X1) diukur dari SD, SMP, SMA/SMK, D3, S1 dan S2 yang menunjukkan bahwa jumlah responden (n) dalam penelitian ini adalah 60 responden. Nilai minimum pada variabel tingkat pendidikan yaitu 1, sedangkan nilai tertinggi yaitu 5 yang masing-masing diperoleh dari jawaban responden untuk semua item pertanyaan pada variabel tingkat pendidikan. Nilai rata-rata jawaban responden dari 2 butir pertanyaan pada variabel tingkat pendidikan adalah 3,82 yang lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 1,026 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah. Median adalah nilai tengah, dalam data ini diketahui nilai tengah pada variabel tingkat pendidikan ialah 4 yang artinya setuju. Modus pada variabel tingkat pendidikan diatas ialah 5 yang artinya setuju.

Pada variabel pengalaman kerja aparatur desa (X2) yang diukur dari masa kerjanya mulai dari 1-5 tahun, 6-10 tahun dan lebih dari 11 tahun. Nilai minimum pada variabel pengalaman kerja aparatur desa yaitu 1, sedangkan nilai tertinggi yaitu 5 yang masing-masing diperoleh dari jawaban responden untuk semua item pertanyaan pada variabel pengalaman kerja aparatur desa. Nilai rata-rata jawaban responden dari 3 butir pertanyaan pada variabel pengalaman kerja aparatur desa adalah 4,33 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 1,052 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah. Median adalah nilai tengah, dalam data ini diketahui nilai tengah pada variabel pengalaman kerja aparatur desa ialah 5 yang artinya sangat setuju. Modus pada variabel tingkat pengalaman kerja aparatur desa diatas ialah 5 yang artinya sangat setuju.

Pada variabel kualitas pelatihan (X3) yang diukur dari bidang pelatihan, jangka waktu pelatihan dan jumlah kualitas. Nilai minimum pada variabel kualitas pelatihan yaitu 2, sedangkan nilai tertinggi yaitu 5 yang masing-masing diperoleh dari jawaban responden untuk semua item pertanyaan pada variabel kualitas pelatihan. Nilai rata-rata jawaban responden dari 4 butir pertanyaan pada variabel kualitas pelatihan adalah 3,67 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 1,047 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah. Median adalah nilai tengah, dalam data ini diketahui nilai tengah pada variabel kualitas pelatihan ialah 4 yang artinya sangat setuju. Modus pada variabel kualitas pelatihan diatas ialah 3 yang artinya sangat setuju.

Pada variabel pemahaman pengelolaan keuangan desa (Y) yang diukur dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nilai minimum pada variabel pengalaman kerja aparatur desa yaitu 1, sedangkan nilai tertinggi yaitu 5 diperoleh dari masing-masing jawaban responden untuk semua item pertanyaan pada variabel

pemahaman pengelolaan keuangan desa. Nilai rata-rata jawaban responden dari 22 butir pertanyaan pada variabel pemahaman pengelolaan keuangan desa adalah 3,73 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 1,034 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah. Median adalah nilai tengah, dalam data ini diketahui nilai tengah pada variabel pengalaman kerja aparatur desa ialah 4 yang artinya setuju. Modus pada variabel tingkat pengalaman kerja aparatur desa diatas ialah 3 yang artinya netral.

Analisis Data Pemahaman pengelolaan Keuangan Desa Outer Model

Outer Model Pengujian model pengukuran akan dilakukan untuk menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah konstruk sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan sebagai penelitian atau tidak. Pada uji validitas ini, ada dua macam evaluasi yang akan dilakukan, yaitu:

Convergen Validity

Convergen Validity dalam PLS dapat dilihat pada nilai *loading factor* yang telah diolah sebelumnya untuk mengukur variabel tersebut. Indikator individu dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi di atas 0.70. namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0.50 sampai 0.60 masih dapat diterima (Ghozali, 2016).

Tabel 2. Outer Loading

Indikator	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja Aparatur Desa	Kualitas Pelatihan	Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa
X1.1	0.963			
X1.2	0.751			
X2.1		0.790		
X2.2		0.864		
X2.3		0.749		
X3.1			0.942	
X3.2			0.963	
X3.3			0.916	
X3.4			0.963	
Y1				0.893
Y2				0.893
Y3				0.923
Y4				0.905
Y5				0.923

Berdasarkan tabel 3 sebagai kriteria pengujian *convergen validity*, terlihat dengan jelas indikator-indikator yang memiliki nilai di lebih besar dari 0.5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi *convergent validity* karena semua *outer loading* yang menyusun konstruk sudah memiliki nilai lebih besar dari 0.5. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan indikator telah layak untuk dijadikan indikator yang dapat mempresentasikan setiap variabel yang bersesuaian

Discriminant Validity

Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda, yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi (Hartanto, 2017).

Tabel 3. Cross Loading

Indikator	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja Aparatur Desa	Kualitas Pelatihan	Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa
X1.1	0.963	0.387	0.725	0.893
X1.2	0.751	0.297	0.191	0.365
X2.1	0.141	0.790	0.288	0.274
X2.2	0.386	0.864	0.431	0.454
X2.3	0.379	0.749	0.327	0.376
X3.1	0.552	0.400	0.942	0.863
X3.2	0.595	0.445	0.963	0.923
X3.3	0.648	0.398	0.916	0.898
X3.4	0.595	0.445	0.963	0.923
Y1	0.963	0.387	0.725	0.893
Y2	0.963	0.387	0.725	0.893
Y3	0.595	0.445	0.963	0.923
Y4	0.623	0.486	0.940	0.905
Y5	0.595	0.445	0.963	0.923

Berdasarkan tabel 4, pengujian dilakukan untuk menguji Reliabilitas penelitian melalui nilai Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha yang kriteria pengujiannya berada di atas 0.6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi konstruk tingkat pendidikan (X1), pengalaman kerja aparatur desa (X2), kualitas pelatihan (X3), dengan lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk pemahaman pengelolaan keuangan desa (Y). Hal ini juga berlaku sebaliknya yakni korelasi konstruk pemahaman pengelolaan keuangan desa (Y) dengan indikator tingkat pendidikan (X1), pengalaman kerja aparatur desa (X2), kualitas pelatihan (X3) lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antara indikator pemahaman pengelolaan keuangan desa (Y) dengan konstruk lainnya tingkat pendidikan (X1), pengalaman kerja aparatur desa (X2), kualitas pelatihan (X3). Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Sehingga dapat disimpulkan masing-masing variabel laten mampu memprediksi ukuran pada blok masing-masing lebih baik daripada ukuran blok lainnya, sehingga evaluasi model pengukuran (outer model) dengan *Discriminant validity* sudah valid.

Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji reliabilitas dapat diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan Cronbach *alpha*. Sementara uji validitas dinilai dari *Average variance extracted (AVE)* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dapat dikatakan reliable jika nilai *composite reliability* dan *Cronbach alpa* di atas 0.70 (Ghozali, 2016).

Tabel 4. Composite reliability

Konstruk	Composite reliability
Tingkat Pendidikan	0.853
Pengalaman Kerja Apartur Desa	0.844
Kualitas Pelatihan	0.972
Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa	0.959

Tabel 5. Cronbach's alpha

Konstruk	Cronbach's alpha
Tingkat Pendidikan	0.706
Pengalaman Kerja Apartur Desa	0.727
Kualitas Pelatihan	0.961
Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa	0.946

Tabel 6. Average variance extracted (AVE)

Konstruk	Average variance extracted (AVE)
Tingkat Pendidikan	0.746
Pengalaman Kerja Apartur Desa	0.644
Kualitas Pelatihan	0.895
Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa	0.823

Berdasarkan tabel. 5 dan 6 dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* semuanya diatas 0.70. Sedangkan untuk tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai AVE sudah diatas 0,5 sehingga pada semua variabel lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti bahwa hasil pengukuran pada setiap konstruk reliabel dan mampu menjelaskan dengan baik masing-masing variabel dimaksud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memiliki realibilitas yang baik untuk setiap konstruk semuanya di atas 0.70.

Uji Inner Model

Inner Model (structural model) adalah model yang menunjukkan hubungan interaksi kekuatan perkiraan antara variabel laten atau konstruk. Uji ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari variabel atau hubungan kausal dalam suatu penelitian. Inner Model Atau Pengukuran Bagian Dalam adalah model yang menghubungkan antar variabel laten. Pengukuran inner model PLS SEM dapat dilihat dari nilai (R^2) lebih besar dari 0,7 dikategorikan sebagai kuat.

Koefisien determinasi (*R-square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *R-square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

Tabel 7. R-square

Konstruk	R-square
PEMAHAMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	0.988

Dapat dijelaskan bahwa nilai *R Square* sebesar 0.988. Nilai *R Square* tersebut dapat diartikan bahwa variabilitas konstruksi dalam penelitian adalah sebesar 98,8% menunjukkan bahwa diinterpretasikan pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja aparatur desa, dan kualitas pelatihan terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa maka hipotesisnya diterima semua atau termasuk dalam kategori kuat.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel serta memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya, tujuannya untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan dengan uji *t* untuk menguji apakah variabel eksogen berpengaruh signifikansi terhadap variabel endogen. Dalam menguji hipotesis, dasar yang digunakan terdapat pada *output result for inner weight* berikut ini:

Tabel 9. Result For Inner Weight Path Coefficient (Mean,STDEV,T-Values)

Konstruk	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1. -> Y	0.656	0.657	0.210	3.132	0.002
X2. -> Y	0.340	0.347	0.195	1.745	0.081
X3. -> Y	0.580	0.545	0.090	6.205	0.000

Berdasarkan Tabel 9. *Result For Inner Weight Path Coefficient* didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan (X1) berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa, dengan nilai original sample sebesar (0.656), yang dimana memiliki nilai T-statistik di atas 1,96 dengan nilai t-statistik (3.132) dan nilai parameter p-values yang dihasilkan sebesar (0.002<0.50) dimana lebih kecil dari taraf signifikan. Dengan demikian tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa.
2. Pengalaman kerja aparatur desa (X2) tidak berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa, dengan nilai original sample sebesar (0.340), yang dimana memiliki nilai T-statistik di bawah 1,96 dengan nilai t-statistik (1.745) dan nilai parameter p-values yang dihasilkan sebesar (0.081 >0.50) dimana lebih besar dari taraf signifikan. Dengan demikian pengalaman kerja aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa.
3. Kualitas pelatihan (X3) berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa dengan nilai original sample sebesar (0.580), yang dimana memiliki nilai T-statistik di atas 1,96 dengan nilai t-statistik (6.205) dan nilai parameter p-values yang dihasilkan sebesar (0.000 < 0.50) dimana lebih kecil dari taraf signifikan. Dengan demikian kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa maka semakin luas pemikiran yang dimiliki, oleh karena itu seseorang akan mampu menganalisa suatu hal menjadi lebih baik terutama dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan pemahaman dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan dari hasil penelitian pada tabel 8 dijelaskan bahwa variabel tingkat pendidikan memberikan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maghfiroh et al., 2022), (Hasibuan, 2010) dan (Murina, 2017), dan (Muzahid, 2014), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Tingkat pendidikan mempengaruhi individu memilih informasi dalam penggunaan laporan keuangan, dikarenakan informasi yang relevan dan handal sering digunakan dalam pengambilan keputusan ketika melakukan planning, management dan control (Pratiwi, 2014).

Pengaruh Pengalaman Kerja Aparatur Desa terhadap Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Pengalaman kerja aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut merupakan gambaran bahwa tidak selamanya pegawai yang telah lama bekerja lebih memahami pengelolaan keuangan desa. Apabila pegawai mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya maka prestasi kerja pegawai tersebut akan semakin baik. Hal ini disebabkan kuatnya pengawasan yang dilakukan oleh camat yang mempunyai pengalaman kerja yang baik dalam keterampilan, dan kemampuan dalam bidangnya terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, camat dalam melakukan pengawasan sudah sangat maksimal. Camat dalam melakukan pengawasan dilakukan sebulan sekali, memiliki standarisasi pengawasan yang dijadikan acuan, serta adanya masukan dari aparatur desa saat dilakukan pengawasan serta 12 desa yang diteliti pada Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima telah menggunakan aplikasi SisKeuDes yang mempermudah pekerjaan aparatur desa dalam membuat maupun melaporkan pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eriva, 2013) dan (Maulia & Januarti, 2014) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan pemahaman laporan keuangan.

Pengaruh Kualitas Pelatihan terhadap Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa aparatur taat dan tepat waktu dalam melaporkan pengelolaan keuangannya sebagai entitas pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelatihan yang diikuti aparatur desa sesuai dengan bidang pekerjaannya maka akan semakin terampil dan berkualitas aparatur desa tersebut dalam memahami pemahaman pengelolaan keuangan desa. Pelatihan yang diikuti oleh pegawai terutama pelatihan pada bidang keuangan membuat pegawai paham bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar dan peraturan perundangan yang berlaku. Semakin sering pegawai mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa maka semakin baik pemahaman pengelolaan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muzahid,

2014), (Eriva, 2013), (Muzahid, 2014), dan (Hasibuan, 2010) bahwa kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan.

KESIMPULAN

Tingkat pendidikan, pengalaman kerja aparatur desa dan kualitas pelatihan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Pengujian menggunakan analisis *Partial Least Square (PLS)*. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Pengalaman kerja aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa. Kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah peneliti mengakui bahwa penelitian masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang perlu diperbaiki oleh peneliti selanjutnya tentang pengelolaan keuangan desa. Keterbatasan tersebut antara lain sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan menggunakan sampel dari berbagai Desa yang berada di Kabupaten Bima dan menambah ukuran sampel. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan menyebarkan kuesioner. Sehingga data yang diolah dalam penelitian ini hanya berdasarkan jawaban dari responden. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan kuesioner dan survey saja melainkan juga dapat menggunakan wawancara dan obeservasi sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid. Variabel dalam peneliti ini terbatas kepada tingkat pendidikan, pengalaman kerja aparatur desa dan kualitas pelatihan sehingga penelitian ini perlu dikembangkan agar lebih mendalam, salah satunya dengan menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi pemahaman dalam mengelola keuangan.

REFERENSI

- Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Srianti Permata. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.47435/Adz-Dzahab.V6i1.584>
- Cahyadi, D. (2009). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, Dan Posisi Di, Dan Posisi Di Pemerintahan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Eksekutif Dan Legislatif (Studi Empiris Pada Eksekutif Dan Legislatif Di Lembaga Pemerintah Peme* (Vol. 01).
- Eriva. (2013). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, Dan Lama Masa Kerja Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Sapd) Pada Kabupaten Ngawi Dan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 47. <https://doi.org/10.20961/Jab.V16i1.189>
- Farlina, W., & Hartono, Y. (2019). Analysis Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(2), 192–201. <https://doi.org/10.31846/Jae.V7i2.218>
- Fatmaliza, F., Syamsir, S., & Jumiati, J. (2018). Kontribusi Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar. *Jess (Journal Of Education On Social Science)*, 2(2), 85. <https://doi.org/10.24036/Jess/Vol2-Iss2/149>
- Fitria, N. (2019). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jaaf (Journal Of Applied Accounting And Finance)*, 3(2), 85–98. <http://dx.doi.org/10.33021/Jaaf.V3i1.680>

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Spss 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanto. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Lamanya Bekerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang*. Uin Raden Fatah.
- Hasibuan. (2010). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Aparatur Desa, Dan Fasilitas Kantor Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Aparatur Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 2(1), 91–106. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V2i1.578>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V2i1.15>
- Kandou, E. E. (2013). Pengaruh Dan Pelatihan Pengembangan Karyawan Terhadap Kerja Karyawan (Studi Pada Pt. Air Manado). *Skripsi*, 1–12. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/viewfile/2435/1972>
- Maghfiroh, L., Askandar, N. S., & Junaidi. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Purwosari. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Manullang, J. (2014). *Mengetahui Faktor-Faktor Penentu Komitmen Organisasi Kepala Sma Di Kota Medan*. 10.
- Maulia, S. T., & Januarti, I. (2014). Pengaruh Usia, Pengalaman Dan Pendidikan Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Murina, S. (2017). Halaman 111-120 Ol.X, No.X. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 2(3), 1.
- Muzahid, M. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi*, 2, 179–196. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/ja/article/view/2174>
- Nusron, L. A., & Andriani, T. (2021). *Journal Of Accounting And Financial Issue Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Ajibarang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pratiwi, W. R. (2014). *Pengaruh Pendidikan, Pengalaman, Dan Faktor Sosial Terhadap Pemanfaatan Informasi Laporan Arus Kas (Studi*.
- Republik Indonesia, 2004. (2004). *Uud Ri No. 32 Tahun 2004*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D Cetakan Ke-26*. Alfabeta.
- Sukriani, L., Eka Dianita Marvilianti Dewi, P., & Arie Wahyuni, M. (2018). Pengaruh Tingkat

Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 85–97.

Suliyanto. (2009). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Dan Pemahaman Akuntansi Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)*. 1.

Van Horn, R. (1999). Intellectual Capital. *Phi Delta Kappan*, 82(9), 721–722. <https://doi.org/10.1177/003172170108200922>

Wibisono, N., Rochman, F., & Nurwanti, E. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun). *Jamer : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.33319/Jamer.V3i1.73>